

PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH KILANG SAGU DI DESA SUNGAI TOHOR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh : Khairil Saleh

Khairilsaleh96@gmail.com

Pembimbing : Zulkarnain

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The purpose of this study was to determine pollution control, factors that inhibit pollution control in Sungai Tohor Village, Kepulauan Meranti Regency. The theoretical concept used is the control theory from Amirullah Harris Budiyono with performance measurement indicators, comparing achievements with standards, taking corrective actions. This study uses a qualitative method that is descriptive in nature, informational selection using snowball sampling. Techniques for collecting data through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the control carried out by the Department of Environment of the Meranti Islands Regency has not been effective, this shows that there has not been a change in river water quality towards a better one, and there is still a lot of pollution due to the disposal of sago waste along the Tohor River. Some influencing factors include, human resources, funds or costs, community participation.

Keywords: Pollution, Control, Environment

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten diwilayah Provinsi Riau yang memiliki potensi yang cukup besar. Kepulauan Meranti diketahui sebagai daerah penghasil dan pengekspor sago terbesar di Indonesia, dengan produksi sago mencapai 198.162 ton sago pertahun. Selain untuk memenuhi kebutuhan sago nasional, sago asal Kepulauan Meranti juga di ekspor ke Negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Jepang. Keberhasilan peningkatan produksi sago ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang didukung oleh

pengusaha sago baik skala makro maupun mikro. Kepulauan Meranti yang di kenal dengan lahan gambut memungkinkan daerah ini sangat cocok dengan karakter ditanami perkebunan sago.

Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan Kecamatan terluas perkebunan sago yaitu 16.154 Ha dengan hasil produksi 71.154 ton per tahun. Dengan Tebing Tinggi Timur sebagai kecamatan terluas kebun sagunya dan produksi terbesar di dibandingkan kecamatan-kecamatan lain, tentunya dampak lingkungan yang diakibatkan lebih besar dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Semakin besar hasil produksi maka semakin besar limbah yang dihasilkan dari produksi sago tersebut..

Perkebunan sagu yang ada di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebagian besar sudah di tanam secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Sehingga dengan banyaknya perkebunan sagu di Desa Sungai Tohor membuat banyaknya kilang sagu yang tumbuh disana. Tercatat ada 18 (delapan belas) kilang sagu yang berada di Desa Sungai Tohor.

Desa Sungai Tohor telah melakukan budidaya tanaman sagu sejak tahun 1970 an dan sampai saat ini budidaya pengembangan tanaman sagu tersebut merupakan penghasilan utama masyarakat desa Sungai Tohor. Sejalan dengan itu, banyaknya masyarakat yang berkebun sagu membuat keberadaan industri sagu pun mulai tumbuh dan berkembang. Minimnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan limbah sagu tersebut menyebabkan pencemaran yang berlangsung lama dan sampai saat ini. Pencemaran limbah sagu ini terjadi terjadi di sepanjang aliran sungai dan bermuara kelaut. Limbah sagu ini berdampak pada perubahan parameter air baik dari sisi warna dan rasa sehingga air berwarna keruh, kotor dan berbau serta bau yang busuk dan sangat menyengat. Sehingga dari fenomena ini seharusnya ada tindakan tegas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengendalikan pencemaran Lingkungan Hidup kepada industri-industri sagu yang melakukan pengrusakan tersebut.

Table 1.2 Daftar Industri Sagu yang Memiliki Izin Lingkungan (UKL/UPL) dan Izin Usaha

No	Nama Usaha	Izin Lingkungan (UKL-UPL)	Izin Usaha
1	kilang Pho Lim San	Ada	Ada
2	Kilang Karim	Ada	Ada
3	Kilang Julius	Ada	Ada
4	Kilang Wanandi Salim	Ada	Ada

5	Kilang Indara Wijaya	Ada	Ada
6	Kilang Berkah Rio	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Kilang Ayu Mandiri	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Kilang Maju Jaya	Tidak Ada	Tidak Ada
9.	Kilang Sumber Usaha	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Kilang Berkat Usaha	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Kilang Family	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Kilang UKM Karya Arifin Samad	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Kilang PU2K (Kelompok Bersama)	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Kilang Makmur	Tidah Ada	Tidak Ada
15	Kilang Berbang Jaya	Tidak Ada	Tidak Ada
16	Kilang Setia Dua Sekawan	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Kilang Tohor Jaya	Tidak Ada	Tidak Ada
18	Kilang Zamri Tohor	Tidak ada	Tidak Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat masih banyaknya kilang sagu yang ada di desa Sungai Tohor yang tidak memiliki Izin Lingkungan (UKL-UPL) dan Izin Usaha. Tercatat dari 18 (delapan belas) kilang sagu yang ada di Desa Sungai Tohor hanya ada 5 (lima) kilang sagu yang memiliki Izin Lingkungan (UKL-UPL) dan Izin Usaha. Hal ini sangat dikhawatirkan, karena apabila kilang sagu tidak memiliki izin tentu saja pengolahan limbahnya tidak sesuai dengan aturan. Skala

produksi yang berbeda namun dampak limbahnya juga bisa sama seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil sikap, tahapan pengawasan yang menyeluruh dan menyentuh bagi semua industri sagu harus dilakukan demi perbaikan lingkungan kedepannya.

Ada beberapa fenomena yang tidak sesuai harapan sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini antara lain:

1. Masih banyak ditemukan kilang sagu yang melakukan pembuangan limbah langsung kedalam sungai.
2. Masih banyak kilang sagu yang tidak memiliki izin lingkungan sehingga tentu saja pengolahan limbahnya tidak sesuai dengan aturan.
3. Permukaan sungai menjadi kotor menjadi perubahan warna terhadap air sungai dan menimbulkan bau busuk.
- 4.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah Kilang Sagu di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah Kilang Sagu di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah Kilang Sagu di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah Kilang Sagu di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis informasi lanjutan bagi pihak-pihak atau peneliti lainnya, khususnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian tentang Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti tentang limbah industri sagu.
2. Manfaat praktis adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diatur oleh Perda No 19 Tahun 2012 demi mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih

2. KONSEP TEORI

2.1 Manajemen

Manajemen menurut **Hasibuan (2016)** merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen menurut **Terry** dalam **Hasibuan (2016)** merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut **Handoko (2001)** mendefinisikan manajemen adalah proses:

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pengarahan

d. Pengawasan

Bahwa manajemen adalah suatu ilmu bidang pengetahuan yang secara sistematis dan usaha sadar anggota organisasi untuk memahami mengapa serta bagaimana manusia untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Menurut **Siswanto (2007)** mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain, dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan didalam organisasi.

Selanjutnya **Yahya (2006)** sebagai seni, manajemen adalah manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan lebih bermanfaat. Paraktek manajemen seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip teori. Manajemen bukan hanya sebagai ilmu dan seni, tetapi merupakan kombinasi dari keduanya telah ditetapkan.

Menurut **Kasim (2005)** pemanfaatan utama manajemen adalah untuk mengelola program kerja melalui proses-proses:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan perencanaan
- c. Pengawasan

Dimana proses yang ada dalam manajemen ini saling bekerja sama antara satu dan lainnya sehingga terwujudlah tujuan dari organisasi tersebut.

Brantas (2009) mengatakan manajemen adalah suatu proses pembimbingan, pengarahan, suatu kelompok orang kearah tujuan organisasi atau maksud-

maksud yang nyata.

Menurut **Hasibuan (2001)** perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana, sehingga rencana merupakan produk dari perencanaan. Dalam suatu rencana harus diterapkan tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan itu. Jadi, setiap perencanaan mengandung dua unsur yaitu tujuan dan pedoman. Ada beberapa perencanaan yang baik, yaitu:

1. Memutuskan dahulu masalah yang akan direncanakan
2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data, dan fakta.
3. Menetapkan beberapa alternatif
4. Memutuskan suatu keputusan yang menjadi rencana.

Perencanaan yang baik tersebut diharapkan mampu memberikan kesepakatan tentang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi secara professional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Handoko (2009) menyatakan perencanaan melalui tahap-tahap pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang di butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan.

2.2 Pengendalian

Mulyadi dan Setyawan (2001) Pengendalian adalah salah satu usaha mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Pengendalian selalu berorientasi pada masa depan, karena baik tujuan yang diwujudkan maupun perilaku yang diharapkan merupakan objek yang berdimensi masa depan. Pengendalian menurut **Siswanto (2011: 39)** adalah mengukur kemajuan kearah tujuan yang ingin dicapai dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk melakukan tindakan perbaikan sebelum penyimpangan menjadi jauh. **Stoner, Freeman, dan Gilbert** dalam **Amirullah dan Budiyo (2004)**

mendefinisikan pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Dikatakannya, pengendalian membantu manajer memonitor keefektifan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan mereka. Sedangkan bagian terpenting dari proses pengendalian itu sendiri adalah mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

Dapat disimpulkan pengendalian merupakan proses untuk memastikan apa yang telah direncanakan sesuai dengan perencanaan. Jika terjadi penyimpangan, maka hal yang perlu segera dilakukan adalah pengambilan tindakan koreksi untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi.

Menurut **Wiludjeng (2007)** proses pengendalian sebagai berikut:

1. Menentukan standar
2. Pengukuran hasil kerja
3. Tindakan koreksi terhadap perbedaan antara standar dengan aktualnya.

Dalam menetapkan standar, harus diperhatikan faktor-faktor penting dalam mengevaluasi hasil kerja. Beberapa jenis standar adalah sebagai berikut:

- a. Standar fisik (*physical standard*)
- b. Standar biaya (*cost standard*)
- c. Standar modal (*capital standard*)
- d. Standar program (*revenue standard*)
- e. Tujuan sebagai standar (*goals as standard*)

Tindakan koreksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindakan perbaikan segera dan tindakan perbaikan mendasar. Tindakan perbaikan segera adalah memperbaiki suatu kegiatan segera mengembalikan kinerja pada jalurnya. Sedangkan tindakan perbaikan mendasar adalah menentukan bagaimana dan mengapa kinerja menyimpang dan mengoreksi sumber penyimpangan tadi.

Menurut **Amirullah dan Haris Budiyo (2004)** secara umum pengendalian terdiri dari tiga langkah, yaitu:

1. Pengukuran kinerja (*measure the performance*)

Pengukuran kinerja yang dimaksud disini adalah perbandingan antara standar dengan pelaksanaan. Perbandingan tersebut hendaknya berdasarkan pandangan kedepan. Dengan pandangan kedepan berarti jika ada penyimpangan, maka penyimpangan ini dapat diperbaiki didalam pelaksanaan nanti. Untuk mengukur kinerja aktual, seorang manajer dapat mempergunakan tiga sumber informasi yang mencakup pengamatan pribadi, laporan lisan, dan laporan-laporan tertulis.

2. Membandingkan prestasi dengan standar (*compare the performance match the standard*)

Langkah ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila prestasi ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali. Kesalahan yang perlu dihindari dalam membandingkan prestasi dengan standar adalah menetapkan standar yang terlalu jauh atau terlalu rendah sehingga prestasi itu dianggap belum optimal apabila standar yang ditetapkan terlalu rendah.

3. Mengambil tindakan korektif (*take corrective action*)

Langkah terakhir dalam proses kontrol adalah mengambil tindakan manajerial. Apabila keputusan manajer adalah mengoreksi kinerja sesungguhnya, maka pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab adalah haruskah diambil tindakan perbaikan yang segera atau tindakan perbaikan mendasar. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi mungkin saja disebabkan oleh standar kinerja yang tidak realistis.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat (**sugiono**). Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini karena landasan teori digunakan sebagai fokus penelitian agar sesuai dengan fakta dilapangan, dalam penelitian ini peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti, dan hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana dilokasi inilah terjadinya pencemaran sungai akibat industri sagu dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pelaku pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.2 Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan tehnik bola salju (snowball sampling). Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang bermula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang mengglanding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu orang dua orang informan kunci (key informan), tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka penelitian mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Bagi seterusnya, sehingga jumlah semakin banyak.

Maka diputuskan yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Pemilik usaha kilang sagu
4. Masyarakat sekitar lokasi pencemaran.

3.3 Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari responden yang menjadi subjek penelitian, beberapa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer ini diperoleh dari :

1. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan masalah penelitian pengendalian pencemaran lingkungan khususnya pencemaran industri sagu Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada kawasan industri sagu Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti.

a. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu terdiri:

1. Profil luas lahan sagu Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti
4. Surat edaran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

5. Buku-buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian
6. Jurnal yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Observasi yakni teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Peneliti melakukan observasi pada tanggal 9 februari 2019.
2. Wawancara yaitu dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait yang dianggap mengetahui isu dan tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh dengan pihak yang lain sebelumnya. Wawancara juga meliputi pandangan-pandangan, persepsi, dan harapan setiap pihak mengenai perencanaan dan pengelolaan tugas dan fungsi itu sendiri. Adapun yang diwawancarai oleh peneliti yaitu:
 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 2. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 3. Pemilik usaha kilang sagu
 4. Masyarakat sekitar lokasi pencemaran
3. Dokumentasi
Pengumpulan data yang berkaitan dengan pengendalian Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen, gambar atau foto dan laporan lainnya yang mendukung informasi dalam penelitian ini.

3.5 Analisis Data

Dalam menganalisis peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh mengenai pengendalian pencemaran lingkungan kilang sagu oleh Dinas Lingkungan didesa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurut **Bogdan** dalam **Sugiono (2013)** menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkannya dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun teknik-teknik analisis data antara lain:

1.2.1 Reduksi Data

Memilih hal hal pokok sesuai dengan fokus penelitian kita, lalu mencari tema yang cocok. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan akan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu perlu. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pengendalian pencemaran lingkungan kilang sagu oleh Dinas Lingkungan Hidup didesa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.2.2 Display Data

Adalah penyajian data dalam bentuk grafik atau chart, network dan lainnya. Teknik ini digunakan karena data yang semakin bertumpuk akan kurang dapat memberikan gambaran dengan menyeluruh, karenanya

kita membutuhkan display data, dengan begitu maka peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan tumpukan data.

1.2.3 Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Merupakan teknik akhir dari penelitian. penelitian harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi arti maupun dari segi kebenaran kesimpulan yang sudah disepakati oleh subjek tempat penelitian ini dilaksanakan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah Kilang Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

4.1.1 Pengukuran kinerja

4.1.1.1 Pengamatan pribadi

Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan yang pertama yaitu pengamatan pribadi. Pengamatan pribadi disini dipergunakan manajer untuk memperoleh pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan sesungguhnya. Pendekatan ini memungkinkan pula liputan yang insentif karena kegiatan yang kecil dan besar dapat diamati, dan pendekatan ini menyajikan peluang-peluang bagi seorang manajer untuk mengetahui hal-hal yang tidak tersurat. Sebagai contoh, para manajer dapat melakukan inspeksi keliling untuk melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan bawahan. Jika terjadi penyimpangan, manajer dapat mengetahui seberapa besar penyimpangan itu.

Pengamatan pribadi disini yaitu oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penanggung jawab atas segala permasalahan yang ada menyangkut pencemaran lingkungan.

kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di dinas tersebut membuat kurang efektifnya pengendalian yang dilakukan, karena masih ada pegawai yang kedudukannya tidak sesuai dengan bidangnya. Hal ini tentu saja menghambat pengendalian yang dilakukan sehingga pengendalian belum maksimal.

4.1.1.2 Laporan lisan

Laporan lisan adalah bentuk laporan yang disampaikan secara oral sehingga bentuknya adalah suara/bunyi yang terdengar. Dalam hal pengukuran kinerja pegawai bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti di Desa Sungai Tohor, dilihat dari adanya laporan-laporan dari setiap pihak. Laporan lisan ini juga untuk melihat kepatuhan pihak industri yang mempunyai izin usaha industri sagu dalam melakukan usaha industri sagu. Laporan lisan ini juga dapat berupa laporan langsung dari perusahaan, tim pengawas maupun masyarakat disekitar lokasi usaha industri sagu. dalam menerima laporan pihak Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan Pesan Pengaduan mengenai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak industri yang dimana masyarakat atau pihak yang lain bisa langsung datang ketempat Dinas Lingkungan Hidup atau melalui pengaduan pesan secara online hal ini mempermudah Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan tindakan pengendalian. Tetapi masih jarang masyarakat membantu dalam menyampaikan laporan mengenai penyimpangan yang terjadi sehingga pengendalian yang dilakukan belum maksimal.

4.1.1.3 Laporan Tertulis

Laporan tertulis ialah laporan sebuah informasi atau keterangan yang disampaikan secara tertulis. Laporan tertulis merupakan salah satu tindakan penilaian yang bertujuan untuk memperoleh data atau fakta-fakta yang

berupa laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat atau pihak industri sagu. diketahui bahwa pihak industri memberikan laporan mengenai kegiatan pengelolaan limbah kepala Dinas Lingkungan Hidup per-triwulan sekali yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan pengelolaan dari limbah industri sehingga dengan adanya laporan dari pihak industri sagu maka dapat memudahkan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengevaluasi pengelolaan limbah tersebut.

Table 5.1 Baku mutu limbah industri sagu karim tahun 2017

N o	Para meter	Satua n	Hasil uji	Nilai rujukan
I	Fisika			
1	Suhu		38.00	27.70
2	Residu Terlarut (TDS)	Mg/L	2000	1.219.00
3	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	200	732.00
II	Kimia Anorganik			
1	pH	-	4.78	4.05
2	BOD5	Mg/L	3.30	150
3	COD	Mg/L	997	300

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pihak industri memberikan laporan per-triwulan mengenai pengelolaan limbah, yang dimana dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi bila terjadi kelebihan. Disini pihak Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan evaluasi terhadap data yang diberikan oleh pihak industri sagu sehingga nantinya tidak sesuai SOP maka pihak industri akan diberikan surat peringatan. Sebelum memberikan surat peringatan, Dinas Lingkungan Hidup terlebih dahulu mengambil sampel untuk

diuji dilaboratorium.

4.2.1 Membandingkan prestasi dengan standar

Langkah ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk menilai Dinas Lingkungan Hidup berpatokan pada baku mutu limbah. Jika limbah yang dihasilkan dibawah baku mutu limbah yang ada berarti limbah tersebut sudah sesuai dengan SOP, sebaliknya jika limbah yang dihasilkan diatas baku mutu limbah yang dibuat berarti industri tersebut telah melanggar SOP dan telah mencemari lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil tindakan berupa pemberian surat peringatan sampai dengan pemberhentian sumber pencemaran. Sebelum mengambil tindakan terlebih dahulu Dinas Lingkungan Hidup mengambil sampel untuk diuji dilaboratorium apakah benar limbah yang dihasilkan melewati baku mutu limbah.

Dalam kondisi seperti ini maka peran pemerintah selaku pemegang kebijakan menjadi sangat penting. Suatu kebijakan umumnya terdiri dari apa saja kebijakan itu, bagaimana pelaksanaannya dan evaluasi dari pada kebijakan tersebut yang nantinya akan menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya jika kebijakan itu ternyata tidak terlaksana dari faktor-faktor pendukungnya.

Peran pemerintah salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, salah satu contohnya seperti masalah kerusakan lingkungan yang terjadi didaerah aliran Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setiap pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang dari pemerintah pusat atau pemerintah diatasnya tidak hanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan permasalahan dan pendanaan kegiatan pembangunannya. Hal tersebut membawa konsekuensi perlunya pelaksanaan management pembangunan daerah

yang lebih profesional, button up dan mandiri. Artinya pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan funfisi-fungsi management yang lebih konprehensif, yaitu adanya keterkaitan proses antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

4.3.1 Mengambil tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan yaitu tindakan untuk menghilangkan penyimpangan yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang sama. Tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap suatu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya. Pencemaran lingkungan disebabkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa lingkungan perairan merupakan tempat pembuangan yang mudah dan murah.

4.3.1.1 Memberikan sanksi atau teguran

Setiap kegiatan atau system operasi dapat saja menyimpang dari operasi standar karena berbagai alasan sehingga menghasilkan pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Dalam melakukan tindakan perbaikan itu sendiri haruslah benar-benar dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Bentuk tindakan perbaikan terhadap pelanggaran yang telah terjadi dalam pengendalian limbah industri sagu yaitu berupa sanksi.

Kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap industri yang ada menjadi salah satu hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Memberikan sanksi haruslah

benar-benar dilakukan pihak yang berkewajiban untuk mengatur dan meluruskan kembali tujuan dan cita-cita organisasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan yang sama. Sanksinya dapat berupa teguran dan pencabutan izin usaha. Walaupun telah ditetapkan sanksi bagi industri sagu tetapi kenyataannya masih ditemukan penyimpangan yang terjadi.

Dinas Lingkungan Hidup memberikan peringatan mengenai kilang sagu yang melakukan penyimpangan yang dimana surat ini berfungsi untuk memperingati industri agar memperbaiki dan mengembalikan sesuai SOP yang telah ditentukan. Surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali, jika peringatan ini tidak dihimbau maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti akan mengambil tindakan yaitu berupa pemberhentian sumber pencemaran sementara. Ini merupakan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu melakukan upaya yang dibutuhkan dalam menunjang terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup baru sampai ketahap memberikan sanksi administratif yaitu berupa teguran tertulis. jika pelanggaran yang dilakukan oleh kilang sagu merupakan tindak pidana, Dinas Lingkungan Hidup melaporkan kepada aparat kepolisian, dan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti.

Dengan adanya sanksi yang diberikan diharapkan kedepannya kilang-kilang sagu ini dapat meminimalisirkan penyimpangan yang terjadi sehingga tingkat pencemaran lingkungan dapat berkurang. Sehingga kedepannya pengelolaan limbah sesuai dengan standard dan baku mutu limbah yang telah ditentukan. Pemberian sanksi ini untuk mempertegas pentingnya pengelolaan limbah yang baik dikarenakan dampak yang ditimbulkan apabila pengelolaan tidak sesuai SOP maka akan terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak kepada

lingkungan sekitar. Tindakan pemberian sanksi ini akan berdampak pada keseriusan pihak kilang sagu dalam mengelola limbah dan memperbaiki sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4.3.1.2 Pencabutan izin lingkungan

Pemberian sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan industri sagu tidak melaksanakan sesuai dengan surat teguran yang telah diberikan oleh pemerintah. Menurut undang-undang No 32 Tahun 2009, mengenai sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan apabila penanggung jawab tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup sampai saat ini belum melakukan pencabutan izin terhadap industri sagu yang melakukan penyimpangan yang dimana Dinas Lingkungan Hidup hanya memberikan surat teguran untuk segera dilakukan perbaikan. Dinas Lingkungan Hidup seharusnya bertindak tegas terhadap industri sagu yang melakukan penyimpangan.

Menurut pengamatan dan analisis penulis, sanksi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti belum tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera pada penanggung jawab usaha atau kegiatan industri sagu yang melakukan penyimpangan. Padahal dampak buruk dari tidak dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran yang akan terjadi. Seperti dengan menurunnya kualitas air, udara serta tanah yang dirasakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Khususnya yang berada disekitar lokasi industri sagu. Pemerintah harus melindungi masyarakat mengenai permasalahan dampak pencemaran yang terjadi, karena itu adalah kewajiban pemerintah dan juga tidak semua masyarakat mengetahui tentang kualitas kesehatan lingkungan yang ditempatinya.

Industri sagu yang tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, akan terus melakukan pencemaran terhadap lingkungan dan masyarakat apabila pemerintah tidak memberikan perlakuan yang tegas dan sanksi yang tepat. Untuk itu dalam mewujudkan lingkungan tanpa pencemaran perlu pengendalian yang optimal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

5.2 Faktor-faktor yang menghambat pengendalian pencemaran lingkungan

5.2.1 Sumber daya manusia

Suatu organisasi memiliki suatu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen agar fungsi-fungsi manajemen lainnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sarana untuk mencapai tujuan organisasi dalam melaksanakan fungsi pengendalian dalam manajemen organisasi ialah sumber daya yaitu sumber daya manusia.

Sumber daya manusia adalah seluruh potensi kemampuan yang dimiliki oleh manusia serta karakteristik, sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dengan segala potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan pengendalian juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang tersedia, tidak dapat dipungkiri bahwa efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian pencemaran industri sagu terkait erat dengan sumber daya manusia yang ada, baik dari sudut keahlian maupun integritasnya.

Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman sumber daya manusia yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, sumber daya juga modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

Peranan sumber daya manusia sehingga

terlaksananya pengawasan dan pengendalian industri sagu adalah dengan meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian secara rutin, terjadwal dan yang melakukan pengendalian haruslah orang-orang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga mengerti bagaimana pengendalian yang baik untuk mewujudkan lingkungan tanpa pencemaran. Maksud kurangnya sumber daya manusia disini yaitu kurangnya kualitas petugas dan jumlah petugas yang ada. Hal ini merupakan kunci keberhasilan dalam pengendalian, karena dalam melakukan pengendalian lingkungan sangat dibutuhkan petugas yang berkualitas dan jumlah petugas harus memadai. Petugas yang berkualitas disini yaitu yang bisa bekerja sesuai dengan bidangnya.

5.2.2 Dana atau biaya

Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan. Pengorbanan sumber daya bertujuan untuk mendapatkan manfaat disaat sekarang atau dimasa yang akan datang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam melakukan pengendalian terhadap pencemaran limbah industri sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, membutuhkan biaya untuk membiayai kegiatan operasional pengendalian tersebut. Mulai dari pembiayaan tim yang bertugas dilapangan, sarana dan prasarana operasional dilapangan mengingat luas dan jauhnya jarak jangkauan yang menjadi tanggung jawab pihak Dinas Lingkungan Hidup.

pendanaan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun dikarenakan anggaran yang kecil menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup tidak maksimal dalam

melakukan pengendalian. Juga sarana dan prasarana yang menjadi faktor penting dalam melakukan pengawasan dan pengendalian karena jarak yang ditempuh laut dan sungai yang jauh belum memadai membuat proses pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti belum maksimal.

5.2.3 Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menemukan suatu keberhasilan suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam mengawasi industri yang mencemari lingkungan. Bentuk partisipasi masyarakat disini bisa saja berbentuk pengaduan atau laporan kepada pihak yang terkait berupa kritikan dan saran melalui media cetak. Selain itu partisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran pihak industri sagu itu sendiri sebagai pengelola industri sagu dalam memahami dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan atau yang sudah ada juga memahami dampak yang ditimbulkan akibat adanya industri sagu yang tidak sesuai dengan prosedur yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Adanya industri sagu dapat memberikan dampak positif dan juga negatif. Dampak positif dari adanya industri sagu ini yaitu membantu masyarakat dalam penjualan hasil tanaman rumbia yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun ada juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri sagu ini yaitu mengganggu masyarakat sekitar karena bau yang di sebabkan, dan juga keberadaan industri sagu ini disepanjang sungai membuat sungai menjadi dangkal dan kotor, sehingga makhluk hidup yang berada di air seperti ikan menjadi mati.

Dengan adanya peran masyarakat dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup mengawasi jika dilapangan menjadi penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan pengaduan terhadap Dinas

Lingkungan Hidup untuk segera dilakukan pengendalian. Hal ini dapat meringankan dan juga dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengendalian dan menjaga lingkungan.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pengendalian limbah industri sagu. Hal ini dikarenakan pengendalian industri sagu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sekitar dengan imbalan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Dengan kata lain masyarakat juga berhak melaporkan setiap pelanggaran atau setiap penyimpangan yang terjadi dilingkungannya.

Dari ketiga faktor diatas dapat penulis uraikan bahwa sumber daya manusia, biaya dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga pengendalian yang dilakukan belum berjalan dengan efektif.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. pengendalian pencemaran limbah kilang sagu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti belum efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak didapati kilang sagu yang masih melakukan pembuangan limbah industri sagu kedalam sungai dan juga masih meresahkan masyarakat. Hal ini tentu saja melanggar aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian pencemaran lingkungan kilang sagu yaitu:
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia juga dapat

mempengaruhi dalam melakukan pengendalian yang dilakukan seperti jumlah petugas dan kualitas petugas yang mendukung, karena apabila petugas pengendalian tidak memiliki kualitas maka tingkat keberhasilan dalam melakukan pengendalian akan kecil.

b. Dana atau Biaya

Faktor dana atau biaya juga menjadi hal penting dalam terwujudnya pengendalian yang optimal. Dalam melakukan pengendalian, mulai dari tim yang bertugas dilapangan, sarana dan prasarana, operasional dilapangan mengingat luas dan jauhnya jarak jangkauan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, hal ini tentu saja membutuhkan biaya yang besar.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menemukan suatu keberhasilan dalam pengendalian. Bentuk partisipasi masyarakat disini bisa berbentuk pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup berupa kritikan dan saran. Selain itu partisipasi masyarakat juga berupa kesadaran pihak kilang sagu dalam memahami dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

6.1 Saran

1. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan sanksi yang tegas terhadap industri-industri yang melakukan penyimpangan sehingga bisa menimbulkan efek jera dan pencemaran terhadap sungai dapat dikurangi.
2. Pemerintah Daerah agar menambah alokasi dana dalam melakukan pengendalian, hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian akan terkendala apabila dananya sedikit.

Hal ini tentu saja akan berdampak pada kurang efektifnya pengendalian. Penting juga dalam meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan yang berwawasan lingkungan, serta menambah fasilitas yang dapat menunjang Dinas Lingkungan Hidup dalam Melakukan Pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Budiyo, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Handoko, Hani, T. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- Handoko, Hani, T. 2001. *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE. Yogyakarta.
- H.B. Siswanto. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hasibuan. S.P. Melayu. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara
- James AF Stoner, R. Edward Freeman, Gilbert JR. 2003. *Manajemen Jilid II*. Jakarta :Gramedia.
- Kasim, Iskandar. 2005. *Manajemen Perubahan CV*. Alfabeta. Bandung.
- Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Siswanto, HB, Dr. 2007. *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Wiludjeng, Sri Sp. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Winardi. 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta : Kencana.
- Yahya, Bernardo Nugroho. 2006. *Product data manajemen dalam dunia*

industri manuaktur,
Jakarta :Bumi Aksar

Penelitian Terdahulu:

Listiyani Novita, 2014. Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai Tahun 2013.

Analuse Fitria, 2017. Strategi Kantor Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Dampak Pencemaran Tambang Emas di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 19 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
5. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaa Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
6. Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun